

EFEKTIVITAS PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN¹

Oleh: Wiwik Kusdaryani², Mujiyono³, Winaryo⁴

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dua variabel, yakni variabel bebas peran komite sekolah (X) dan variabel terikat peningkatan kualitas pendidikan di SD (Y), sehingga akan diketahui keefektifan hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Populasi penelitian adalah ketua komite Sekolah Dasar sejumlah 32 SD Negeri dan Swasta yang terbesar di wilayah Kecamatan Doro. Karena jumlah populasi hanya 32, maka populasi dijadikan sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dengan regresi untuk instrumen I yaitu untuk mengungkap 2 (dua) variabel yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y), hanya mencari keefektifannya. Untuk menganalisis strategi menggunakan binomial tes. Untuk menguji hipotesis dengan membandingkan r hitung dengan nilai r tabel untuk taraf kesalahan 5% dengan n=32 diperoleh 0,349 dan untuk 1% diperoleh 0,449. Harga r hitung lebih kecil dari r tabel baik untuk kesalahan 5% maupun 1% ($0,219 < 0,39 < 0,449$) dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima, disimpulkan peran komite sekolah tidak fektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Sekolah Dasar karena r hitung hanya mendapat 0,219 yang lebih kecil dari r tabel baik kesalahan 5% maupun 1%. Kecenderungan komite sekolah memilih strategi directing (pengarahan) 18 kasus, proporsi observasi 0,56. Kecenderungan memilih strategi brainstorming (curah pendapat) 14 kasus, proporsi observasi 0,44. Besarnya nilai proporsi kasus adalah 0,50 dengan asymply signifikan 0,596. Hasil penelitian ini direkomendasikan kepada: 1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan melalui Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Doro agar dapat memberikan pengarahan kepada komite sekolah untuk berperan aktif dalam membantu meningkatkan kualitas pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, 2) Kepala Sekolah agar dapat bekerja sama dengan komite sekolah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, 3) Komite Sekolah agar mengerti tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat berperan aktif dalam membantu meningkatkan kualitas pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

Kata-kata kunci: peran komite sekolah, peningkatan, kualitas pendidikan

¹ Ringkasan Hasil Penelitian, Tahun 2008

² Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Semarang

³ Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP PGRI Semarang

⁴ Guru SD 02 Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan

A. Pendahuluan

Seiring diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka setiap Kabupaten/Kota berhak mengelola daerahnya sendiri; baik keuangan maupun berbagai bidang tidak terkecuali pendidikan. Sebelum pelaksanaan otonomi, institusi pendidikan berada dalam naungan Departemen Pendidikan Nasional namun sekarang segala sesuatunya diserahkan langsung ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kabupaten/Kota berperan penuh dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karenanya pemerintah Kabupaten/Kota sesuai Kepmendiknas nomor 044/U/2002 membentuk Dewan Pendidikan untuk Kabupaten/Kota sedang untuk institusi sekolah dibentuk Komite Sekolah sebagai mitra dalam memajukan kualitas pendidikan.

Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari 19 kecamatan terdiri dari daerah pegunungan, dataran rendah sampai memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya. Daerah pegunungan (atas) lebih menitikberatkan pendidikan cenderung menyiapkan peserta didik ke arah kompetitif global, sedangkan daerah pantai pendidikannya cenderung pragmatis.

Kecamatan Doro merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Pekalongan yang secara geografis terdiri dari daerah pegunungan dan dataran rendah. Dengan demikian institusi Sekolah Dasar menyebar sepenjuru Kecamatan Doro. Data yang terhimpun ada 31 Sekolah Dasar Negeri dan satu Sekolah Dasar Swasta, yang masing-masing terdapat pengurus komite sekolah yang secara aktif mendukung kinerja sekolah, sebab komite sekolah bukan hanya *partnership* saja melainkan subjek dalam ikut mendukung kemajuan sekolah dasar.

Berdasarkan Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang acuan pembentukan komite sekolah, maka komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Dari uraian di atas bahwa peran komite sekolah sebagai jembatan antara *stake holder*, wali murid, dan masyarakat dengan pihak satuan pendidikan sekolah sehingga perannya sangat vital dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan di Sekolah Dasar di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

Kenyataan di lapangan apa yang telah digariskan oleh pemerintah melalui Mendiknas masih jauh panggang dari api. Peran Komite sekolah tidak banyak aktif dalam mendukung peningkatan kualitas Sekolah Dasar. Komite Sekolah hanya dijadikan alat legalitas dalam menarik iuran yang dibebankan kepada wali murid tanpa komite sekolah mampu melontarkan ide-ide cemerlangnya. Bahkan beberapa komite sekolah didikte oleh pihak sekolah dalam pengelolaan keuangan. Padahal peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari segi keuangan. Lebih parah lagi ada beberapa sekolah yang hanya bermusyawarah dengan ketua komite sekolah tanpa menyertakan anggota komite. Oleh karenanya semboyan peningkatan kualitas pendidikan hanya merupakan slogan belaka.

Faktor lain sebagai penyebab tersumbatnya komunikasi antara komite sekolah dengan lembaga sekolah adalah kurang pemahamannya beberapa anggota pengurus komite sekolah. Mereka beranggapan bahwa peran komite hanya pada saat wali murid di awal tahun pelajaran. Padahal komite sekolah sangat mandiri tidak mempunyai hubungan yang hierarkis dengan lembaga pemerintah tanpa ada keterikatan. Namun kenyataannya, pengurus komite sekolah masih di bawah bayang-bayang kepala sekolah.

Selanjutnya kekurangan tersebut ditambah dengan tidak adanya komitmen dalam melaksanakan tugas sebagai komite sekolah. Antar anggota pengurus jalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi, sedang ketua komite sibuk dengan arahan-arahan kepala sekolah yang harus dikerjakan ketua komite. Kadang tidak jarang ketua komite berjalan sendiri tanpa *support* dari anggota pengurus. Hal ini disebabkan pihak sekolah yang *protect over* terhadap komite sekolah agar longgar dalam melakukan kontrol sekolah. Akibatnya bukan peningkatan kualitas yang didapat namun sebaliknya menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di Sekolah Dasar.

Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya dana pendukung dalam operasional komite sekolah sehingga pengurus komite sekolah jarang melakukan pemantauan terhadap kinerja sekolah, kepala sekolah dan para stafnya. Saking terbatasnya dana pengurus komite sekolah hanya rapat setahun sekali dengan wali murid yakni pada awal tahun pelajaran. Rapat komite sekolah yang terjadwal satu bulan sekali tidak terpenuhi akibat kekurangan dana tersebut.

B. Tinjauan Pustaka

1. Komite Sekolah

a. Kualitas Proses Pendidikan

Pemerintah telah memberikan payung hukum dengan menetapkan Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Acuan Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah agar diimplementasikan di lembaga-lembaga satuan sekolah baik tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas.

Istilah komite sekolah menurut Kepmendiknas tersebut disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masing-masing satuan pendidikan seperti komite pendidikan, komite pendidikan luar sekolah, dewan sekolah, majelis sekolah, atau nama lain yang disepakati tetapi pada intinya merupakan suatu badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikannya masing-masing.

Komite sekolah dapat terdiri dari satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau dalam beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan atau karena pertimbangan lainnya. Namun demikian kedudukan komite berada pada satuan pendidikan masing-masing. Komite SD berada di SD, komite SMP/MTs terdapat di sekolah tersebut, SMA/MA berada pada satuan pendidikan SMA/MA.

Dalam Kepmendiknas nomor 044/U/2002 disebutkan tujuan dibentuknya komite sekolah untuk: a) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa

masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, b) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan, dan c) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam menyelenggarakan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Dari deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa komite sekolah dibentuk untuk menunjang peningkatan kualitas pendidikan di satuan sekolah masing-masing bukan sebagai tukang menetapkan (*legal formal*) penarikan dana-dana sekolah.

Komite sekolah yang baik haruslah dapat berjalan pada koridor semestinya, artinya sesuai dengan peran dan fungsinya agar dalam mengawal sekolah tidak melenceng dari rambu-rambu yang telah ditetapkan. Peran dan fungsi komite sekolah adalah:

- 1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan masing-masing.
- 2) Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan,
- 3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan,
- 4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan (Kepmendiknas Nomor 044/U/2002).

Sementara itu, fungsi komite sekolah adalah: a) mendorong timbulnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, b) melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, c) menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, d) memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: i) kebijakan dan program pendidikan, ii) rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS), iii) kriteria kinerja satuan pendidikan, iv) kriteria tenaga pendidikan, v) kriteria fasilitas pendidikan, vi) hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan; e) mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, f) menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, g) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan (Kepmendiknas Nomor 044/U/2002).

Menyimak deskripsi di atas sebenarnya tugas komite sekolah khususnya di satuan pendidikan sekolah dasar sangatlah vital dalam upaya memajukan kualitas pendidikan, sebab dalam setiap gerak langkah sekolah dasar selalu di *back up* komite sekolah. Bukan hanya pada poin f saja yang dijadikan acuan Sekolah Dasar dalam menggalang dana masyarakat lewat rapat gabungan antara orang tua, sekolah, dan komite sekolah, namun haruslah menyeluruh dari semua unsur yang telah ditetapkan pemerintah.

b. Peningkatan Kualitas Pendidikan di Sekolah Dasar

Sebagai suatu konsep, kualitas sering ditafsirkan dengan beragam definisi, sebanyak orang yang mendefinisikan tergantung kepada pihak dan sudut pandang mana konsep itu dipersepsikan. Dengan demikian arti kualitas pendidikan berkenaan dengan apa yang dihasilkan dan siapa pemakai pendidikan. Pengertian tersebut merujuk kepada nilai tambah yang diberikan oleh pendidikan, pihak-pihak yang memproses serta menikmati hasil-hasil pendidikan.

Secara substantif kualitas mengandung sifat dan tarap. Sifat adalah sesuatu yang menerangkan keadaan. Sedangkan tarap menunjukkan kedudukan dalam skala (Sanusi, 2005: 40). Keragaman cara pandang mengenai sifat dan taraf itu memungkinkan perbedaan pendekatan terhadap kualitas pendidikan. Pendekatan pertama, mendasarkan diri pada deskripsi mengenai relevansi pendidikan dengan dunia kerja. Pendekatan ini sering disebut dengan pendekatan ekonomi. Pendekatan kedua, disebut pendekatan nilai intrinsik pendidikan, yang diekspresikan dalam ukuran-ukuran sikap, kepribadian, dan kemampuan intelektual yang sesuai dengan harapan dan tujuan pendidikan nasional.

Pemahaman atas kualitas pendidikan perlu dibenahi oleh pengertian proses. Konsep proses, menurut Sudjana dan Susanta (dalam Anwar 2003: 41) merujuk kepada kegiatan penanganan transformasi masukan-masukan melalui subsistem pemrosesan menjadi keluaran serta hasil-hasil yang berasal dari masukan dan tindakan berikutnya melalui umpan balik dan evaluasi keluaran.

Konsep tersebut didasarkan atas asumsi bahwa pendidikan sebagai sistem terbuka mengandung subsistem masukan keluaran, dan umpan balik secara internal serta eksternal. Berdasarkan pemahaman demikian maka kualitas proses menunjukkan kebermutuan sub-subsistem dalam sistem proses yang meliputi tindakan kerja, komunikasi, dan monitoring.

Subsistem tindakan kerja adalah komponen organisasi yang menentukan ukuran kemampuan sistem dalam melaksanakan apa yang seharusnya dikerjakan. Subsistem komunikasi berfungsi memproses dan memberikan informasi yang memadai mengenai seluruh tahapan tindakan system dan subsistem. Sedangkan fungsi subsistem monitoring adalah kontrol sistem terhadap kegiatan dan akuntabilitas sub-subsistem dalam hubungan sinergiknya di seluruh sistem.

Ditelaah dari sudut kinerja sistemnya, kualitas proses pendidikan dapat diukur dengan indikator-indikator sebagaimana dirinci oleh Makmun (2007:41), yaitu efisiensi, produktifitas, efektifitas, relevansi, akuntabilitas, kesehatan institusi sekolah, dan semangat berinovasi.

Efisiensi berkaitan dengan optimalisasi pendayagunaan sumber pendidikan terbatas, untuk mencapai *output* yang optimal. Suatu proses pendidikan yang efisien adalah yang mampu menciptakan keseimbangan antara sumber-sumber yang dibutuhkan dengan yang tersedia, guna mengurangi hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan pendidikan (Suryadi, 2005: 212). Secara operasional, efisiensi dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu efisiensi internal dan eksternal. Efisiensi internal merujuk kepada kemampuan menghasilkan keluaran yang diharapkan dengan biaya minimal, atau memaksimalkan keluaran yang diharapkan pada tingkat masukan

tertentu. Sedangkan efisiensi eksternal menunjukkan hubungan antara keluaran pendidikan dengan tujuan-tujuan masyarakat yang lebih luas. Indikator kuantitatif efisiensi internal sekolah antara lain: 1) angka mengulang kelas, 2) tingkat kelulusan, 3) tingkat putus sekolah, 4) lama penyesuaian studi, 5) angka siswa bertahan. Efisiensi ekksternal dinilai menurut dua kriteria, yaitu: 1) seberapa jauh pendidikan memberikan keterampilan yang diperlukan, dan 2) seberapa jauh keluaran pendidikan terserap ke pasar kerja, mendapat pekerjaan dan penghasilan yang mereka harapkan, serta mampu menggunakan keterampilannya dalam pekerjaan. Dalam kaitan pendidikan di sekolah dasar (SD) indikator keberhasilan poin 2 adalah seberapa banyak siswa diterima di SMP Negeri.

Efektivitas pendidikan menggambarkan tingkat kesesuaian antara jumlah keluaran yang dihasilkan dengan jumlah yang ditargetkan. Sementara produk-tifitas pendidikan merupakan ukuran mengenai tingkat daya hasil suatu program dalam satuan waktu tertentu (Makmun 2007: 42).

Adapun indikator yang disebut terakhir, kesehatan institusi pendidikan pada dasarnya menunjukkan tingkat kepuasan, kekuatan motivasi, dan derajat keterlibatan dewan guru dalam pengambilan keputusan. Sedangkan semangat berinovasi berkaitan dengan tingkat kepekaan dan ketanggapan terhadap perubahan perkembangan dan tantangan yang terjadi di lingkungannya serta kemampuan dan kemauan untuk melakukan penyesuaian melalui upaya-upaya perbaikan, penyempurnaan, dan pembaharuan.

Pada tingkat yang lebih teknis operasional, kualitas proses pendidikan dapat ditelaah dengan indikator keberhasilan sekolah dasar sebagaimana yang dirinci oleh Depdikbud (1997) yang meliputi nama komponen, jumlah subkomponen, dan jumlah keberhasilan sekolah dasar yang dimaksud terperinci sebagai berikut: 1) ketercapaian tujuan pendidikan, 3 subkomponen dan 12 indikator; 2) organisasi dan manajemen, 4 dan 17; 3) tenaga kependidikan (guru), 2 dan 8; 4) kegiatan belajar mengajar, 4 dan 14; 5) lingkungan sekolah, 6 dan 16; 6) pengembangan sarana dan prasarana, 6 dan 15; 7) kesiswaan, 3 dan 8; 8) hubungan kerja sama sekolah 1 subkomponen dan 5 indikator.

Sedang empat subkomponen dalam ICM adalah: 1) kelengkapan dan pemahaman kurikulum, 2) persiapan KMB, 3) pelaksanaan KBM, dan 4) penilaian KBM. Indikator-indikator sebagai penjabaran atas keempat subkomponen KBM tersebut, secara keseluruhan menuntut kemampuan guru dalam mengadministrasi proses pembelajaran dan menerapkan teknologi pembelajaran.

2. Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Membantu Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Kebijaksanaan pendidikan dibuat dan diimplementasikan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena masalah-masalah yang dihadapi masyarakat bermaksud dipecahkan, maka dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan dan partisipasi masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan mengacu pada alasan demokrasi, sebab pendidikan merupakan bagian

dari seperangkat untuk menjalankan pemerintahan. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam kebijaksanaan pendidikan bukanlah jargon baru lagi.

Kebijaksanaan pendidikan secara konkret dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat di bidang pendidikan. Masyarakat lebih banyak tahu mengenai masalah mereka sendiri, dan bahkan juga banyak mengetahui bagaimana cara memecahkannya. Maka, keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan tersebut justru memperkuat pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pelaksana formal (kepala sekolah dan guru).

Masyarakat sebagai modal dasar pembangunan jika diglaakkan besar sumbangannya terhadap pembangunan tidak terkecuali pendidikan. Keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan kebijaksanaan pendidikan adalah manifestasi dari pemanfaatan dan pendayagunaan modal dasar pembangunan.

Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan tidak saja sekedar dipandang sebagai loyalitas masyarakat atas pemerintahnya, melainkan juga kebijaksanaan tersebut hendaknya dianggap oleh masyarakat sebagai miliknya. Dengan adanya perasaan memiliki terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan, masyarakat akan semakin banyak sumbangannya dalam pelaksanaan-pelaksanaan kebijaksanaan, termasuk kebijaksanaan pendidikan.

Namun tidak semua masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan kebijaksanaan tetapi masyarakat memilih wakilnya sebagai anggota komite sekolah untuk ikut serta mengawal kebijaksanaan tersebut.

Partisipasi masyarakat yang telah diwakili komite sekolah merupakan suatu term yang menunjuk kepada adanya keikutsertaan secara nyata dalam suatu kegiatan. Partisipasi komite sekolah dalam mengawal kebijaksanaan pendidikan adalah keikutsertaan komite sekolah yang mewakili masyarakat dalam membe-rikan gagasan, kritik membangun, dukungan dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan.

Dalam sistem pemerintahan yang *top down* partisipasi masyarakat dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibuat dan diimplementasikan tidak begitu dipermasalahan, tetapi pada sistem pemerintahan yang *bottom up* tingginya partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijaksanaan dapat dijadikan sebagai indikasi sukses kebijaksanaan.

Muhadjir (1982: 117) menggolongkan partisipasi masyarakat dalam tipologinya ialah partisipasi kuantitatif dan kualitatif. Partisipasi kuantitatif menunjuk kepada frekuensi keikutsertaan terhadap implementasi kebijaksanaan, sementara partisipasi kualitatif menunjuk kepada tingkat dan derajatnya.

Koentjoroningrat (1998: 24) menggolongkan partisipasi masyarakat berdasarkan posisi individu dalam kelompoknya. Pertama, partisipasi masyarakat dalam aktifitas bersama dalam proyek khusus: kedua, partisipasi anggota masyarakat sebagai individu dalam aktifitas bersama pembangunan.

Sementara Miftah Toha (1999: 78) menggolongkan partisipasi masyarakat ke dalam tiga golongan, yaitu: 1) partisipasi mandiri yang merupakan usaha berperan serta yang dilakukan secara mandiri oleh pelakunya, 2) partisipasi mobilisasi, 3) partisipasi seremoni.

Partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari cakupannya, yaitu partisipasi secara sempit, partisipasi secara luas dan partisipasi yang merupakan lawan dari kegiatan politik (Imron, 2003: 81). Secara luas partisipasi dapat diartikan sebagai demokrasi politik: masyarakat yang menentukan tujuan, strategi, dan perwakilannya dalam pelaksanaan kebijaksanaan atau pembangunan bidang pendidikan. Secara sempit, partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses perubahan dan pengembangan masyarakat sesuai dengan arti pembangunansendiri. Sebagai lawan dalam kegiatan politik, partisipasi dapat diartikan sebagai golongan-golongan masyarakat yang berbeda-beda kepentingannya dididik mengajukan secara rasional keinginannya dan menerima sukarela keputusan pembangunan.

Dari paparan di atas jelaslah bahwa komite sekolah berperan aktif sebagai subjek perubahan pembangunan pendidikan selain tenaga kependidikan, sebab perannya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar, bukan sebagai mitra pasif yang tugasnya hanya mengikuti arah kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Komite dapat memberikan usulan, ide, gagasan, bahkan kritik dan saran yang memadai sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan.

C. Metode Penelitian

1. Variabel Penelitian

Penelitian ini mengkaji dua variabel, yakni variabel bebas peran komite sekolah (X) dan variabel terikat peningkatan kualitas pendidikan di SD (Y), sehingga akan diketahui keefektifan hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah ketua komite Sekolah Dasar sejumlah 32 SD Negeri dan Swasta yang terbesar di wilayah Kecamatan Doro. Karena jumlah populasi hanya 32, maka populasi dijadikan sampel penelitian. Hal ini dimaksudkan agar hasil yang diperoleh dapat benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada di Kecamatan Doro. Sampel populasi tidak menggunakan teknik sampling sebagai acuan penelitian. Semua sampel penelitian dilakukan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Ketua komite sekolah dipersilahkan mengisi angket yang telah disiapkan peneliti dengan menjawab beberapa item yang diberikan. Setiap bagian berisi 10 item yang masing-masing dengan *option* 1,2,3,4,dan 5,

Bagian A Peran Komite Sekolah terdiri dari 10 item dengan pilihan 1,2,3,4,dan 5. Bagian B Peningkatan Kualitas SD berisi 10 item dengan *option* 1,2,3,4, dan 5.

Angket kedua berisi tentang pilihan strategi peran komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Doro dengan memilih 2 (dua) item jawaban.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dengan regresi untuk instrumen I yaitu untuk mengungkap 2 (dua) variabel yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y), hanya mencari keefektifannya. Untuk menganalisis strategi menggunakan binomial tes. Sedangkan untuk mengetahui secara keseluruhan menggunakan analisis deskriptif. Teknik analisis menggunakan program SPSS 10.0.

D. Hasil Penelitian

Untuk mengetahui keefektifan peran komite sekolah (X) dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Sekolah Dasar (Y) menggunakan teknik regresi, karena dengan regresi dapat diketahui variabel independent (Y) dapat direkondisikan untuk dinaikkan atau diturunkan.

Melalui analisis menggunakan program SPSS 10.0 dapat diketahui hasilnya sebagai berikut.

Tabel 1. Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y	21,5938	8,5416	32
X	34,9688	5,0449	32

Tabel di atas merupakan tabel statistik deskriptif untuk rerata Y (peningkatan kualitas pendidikan SD) adalah 21,5938 dan simpangan baku (standar deviasi) sebesar 8,5416. Untuk variabel X (peran komite sekolah) dengan rerata 34,9688, sedangkan standar deviasinya sebesar 5,0449. N (kasus) adalah banyaknya kasus yang jalan atau yang diolah sebesar 32 kasus.

Tabel 2. Correlations

Correlations

		Y	X
Pearson Correlation	Y	1,000	,219
	X	,219	1,000
Sig. (1-tailed)	Y	,	,114
	X	,114	,
N	Y	32	32
	X	32	32

Tabel 2 merupakan matrik intrekorelasi antara variabel X dengan Y. Korelasi yang digunakan adalah korelasi Pearson (*product moment*). Pada tabel matrik korelasi ini variabel Y dikorelasikan dengan Y dan X. Begitu juga variabel X dikorelasikan dengan X dan Y. Besarnya korelasi Y dengan Y adalah 1.000 dan korelasi X terhadap Y sebesar 0,219. Banyaknya kasus yang jalan adalah 32 kasus dengan menggunakan uji satu pihak (*one tailed*).

Matrik korelasi terdapat angka 0,219 pada kolom Y dan baris X begitu juga pada kolom X pada baris. Angka ini berarti menunjukkan koefisien korelasi yang positif antara variabel X dan Y. Angka 0,219 merupakan r hitung. Untuk menguji hipotesis yang diajukan apakah diterima atau ditolak dengan melihat signifikansi. Adapun ketentuan penerimaan atau penolakan apabila angka signifikansi di bawah atau sama dengan 0,05, maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

Untuk menguji hipotesis dengan membandingkan r hitung dengan nilai r tabel untuk taraf kesalahan 5% dengan $n=32$ diperoleh 0,349 dan untuk 1% diperoleh 0,449. Harga r hitung lebih kecil dari r tabel baik untuk kesalahan 5% maupun 1% ($0,219 < 0,349 < 0,449$) dengan demikian H_a ditolak dan H_0 diterima, disimpulkan peran komite sekolah tidak efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Sekolah Dasar karena r hitung hanya mendapat 0,219 yang lebih kecil dari r tabel baik kesalahan 5% maupun 1%.

Tabel 3. Model Summary

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	Durbin-Watson
1	,219 ^a	,048	,016	8,4719	,048	1,512	1	30	,228	1,995

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

R square (koefisien determinasi) sebesar 0,048 atau 4,8%. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase keefektifan variabel independen (predictor) terhadap perubahan variabel dependen. Dari hasil olahan tersebut diperoleh nilai koefisien determinasi = 0,048. Artinya besarnya keefektifan variabel independen (predictor/X) terhadap variabel dependen (kriterium/Y) adalah 4,8% sedangkan sisanya 95,2% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel independen yaitu peran komite sekolah.

Besarnya kesalahan standar estimasi (Se) sebesar 8,4719, nilai Durbin-Watson adalah 1,995. Nilai Durbin-Watson digunakan untuk menentukan uji autokorelasi dengan ketentuan apabila nilai Durbin-Watson di bawah 5 maka tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4. Anova

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	108,510	1	108,510	1,512	,228 ^a
	Residual	2153,209	30	71,774		
	Total	2261,719	31			

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Tabel anova menunjukkan nilai F hitung sebesar 1,512 dengan df1= derajat kebebasan pembilang 1 dan df2 = derajat kebebasan penyebut 31. Pada kolom signifikan didapat nilai signifikansi sebesar 0,228, yang berarti Ha ditolak dan Ho diterima.

Pengujian hipotesis dengan membandingkan F tabel dengan df1 dan df2 31 didapat 4,17 untuk taraf 5% dan 7,58 untuk taraf 1 %. Maka F hitung (0,228) jauh lebih kecil dari F tabel (4,17 dan 7,58), dan Ha ditolak dan Ho diterima sehingga dapat diberlakukan pada sampel. Nilai F dapat digunakan dalam pengujian untuk mengetahui apakah variasi nilai variabel independen dapat menjelaskan (*explained*) variasi nilai dependen.

Tabel 5. Coefficient

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,625	10,653		,810	,425
	X	,371	,302	,219	1,230	,228

a. Dependent Variable: Y

Harga beta nol 8,625 (a) dan harga beta satu (b) 0,371, maka persamaan garis regresi antara peran komite sekolah dan kualitas pendidikan SD dapat disusun sebagai berikut.

$$Y = 8,625 + 0,371x$$

Persamaan regresi yang telah ditemukan dapat digunakan untuk melakukan prediksi (estimasi) bagaimana keefektifan variabel independen terhadap besarnya perubahan variabel dependen. Bila peran komite sekolah sebesar 34, maka kualitas pendidikan SD adalah

$$Y = 8,625 + 0,371 \times 34 = 21,239$$

Jadi estimasi peningkatan kualitas pendidikan SD sebesar 21,239 dengan penambahan keefektifan peran komite sekolah sebesar 34. Persamaan regresi tersebut diartikan bahwa nilai peran komite sekolah bertambah 1 maka nilai rata-rata peningkatan kualitas pendidikan SD akan bertambah 0,371 atau setiap nilai peran komite bertambah 10 dan nilai rata-rata peningkatan kualitas pendidikan SD akan bertambah 3,7%.

Nilai t test = 1,230. Nilai ini digunakan dalam pengujian terhadap koefisien regresi untuk mengetahui apakah X berpengaruh terhadap Y. H_a akan diterima apabila signifikansi di bawah atau sama dengan 0,05. Sementara angka signifikansi diperoleh 0,228 yang jauh lebih besar dari 0,05 ($0,228 > 0,05$), maka H_0 yang diterima. Kesimpulannya peran komite sekolah tidak efektif dalam peningkatan kualitas pendidikan SD.

Tabel 6. Residual Statistik

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	18,6385	25,3139	21,5938	1,8709	32
Residual	-12,8305	23,5404	-6,66E-16	8,3342	32
Std. Predicted Value	-1,580	1,988	,000	1,000	32
Std. Residual	-1,514	2,779	,000	,984	32

a. Dependent Variable: Y

Tabel di atas hanya menggambarkan nilai minimum, maksimum, rerata, dan standar deviasi dari 32 sampel.

Sementara itu, untuk menganalisis strategi yang dapat meningkatkan peran komite sekolah terhadap kualitas pendidikan SD menggunakan tes binomial yang hasilnya sebagai berikut.

Tabel 7. Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
STRATEGI	32	1,4375	,5040	1,00	2,00

Dari jumlah sampel 32 kecenderungan komite sekolah memilih strategi peningkatan kualitas pendidikan SD 1,4375 standar deviasi 0,5040, nilai minimum 1 dan maksimum 2.

Tabel 8. Tes Binomial

Binomial Test

	Category	N	Observed Prop.	Test Prop.	Asymp. Sig. (2-tailed)
STRATEGI Group 1	directing	18	,56	,50	,596 ^a
Group 2	brainstorming	14	,44		
Total		32	1,00		

a. Based on Z Approximation.

Kecenderungan komite sekolah memilih strategi directing (pengarahan) 18 kasus, proporsi observasi 0,56. Kecenderungan memilih strategi brainstorming (curah pendapat) 14 kasus, proporsi observasi 0,44. Besarnya nilai proporsi kasus adalah 0,50 dengan asymply signifikan 0,596. Bila nilai asymply signifikan di atas 0,05 Ho diterima dan Ha ditolak. Kesimpulannya peluang komite sekolah memilih strategi directing dan brainstorming adalah sama (50%).

Bila dibandingkan dengan tabel binomial, jumlah sampel N=32, sampel yang memilih strategi directing ada 18 dan brainstorming 14, frekuensi terkecil adalah (x) 14. Berdasarkan tabel dengan N = 32, x = 14 maka koefisien binomialnya adalah 0,788 dengan taraf kesalahan ditetapkan 1% atau 0,01, maka harga p sebesar 0,788 lebih besar dari 0,01 ($0,788 > 0,01$) sehingga Ho diterima Ha ditolak. Kesimpulannya adalah kemungkinan komite sekolah dalam memilih dua strategi adalah sama.

E. Penutup

1. Simpulan

Dari hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Peran komite sekolah sangat tidak efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.
- b. Strategi yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan Sekolah Dasar oleh komite sekolah adalah sebanding antara *directing* (pengarahan) dan *brainstorming* (curah pendapat).

2. Saran

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pijakan sehingga disarankan kepada:

- a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan melalui Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Doro agar dapat memberikan pengarahan kepada komite sekolah untuk berperan aktif dalam membantu meningkatkan kualitas pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.
- b. Kepala Sekolah agar dapat bekerja sama dengan komite sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

- c. Komite Sekolah agar mengerti tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat berperan aktif dalam membantu meningkatkan kualitas pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

Daftar Pustaka

- Anwar, Moch Idohi. 2003. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Depdikbud. 1997. *Standar Mutu Pendidikan*. Jakarta: Depdikbud.
- Imron, Ali. 2003. *Kebijaksanaan Pendidikan Indonesia: Proses, Produk dan Masa depannya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Makmun, Niken Restary. 2007. *Pendidikan yang Manusiawi ala Freire*. Jakarta: Gramedia
- Moehadjir, Noeng. 1982. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Malang: P3T IKIP Malang.
- Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Acuan Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Koentjoroningrat. 1998. *Kebudayaan dan Mentalitas Manusia*. Jakarta: Gramedia.
- Santoso, Singgih. 2002. *Buku Latihan SPSS Statistik Multivariat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Sanusi, Ahmad. 2004. *Apa yang Membuat UPI Kita UPI*. Orasi Ilmiah Dies Natalis ke 50 UPI Bandung.
- Sugiyono. 2002. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono dan Wibowo, Eri. 2001. *Statistika Penelitian dan Aplikasinya dengan SPSS 11.0 for Windows*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, Ace. 2004. *Efisiensi Pendidikan*. Jakarta: Pusat Informatik untuk Pengelolaan Pendidikan. Balitbang Depdiknas.
- Thoha, Miftah. 1999. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.